

1. SEX ROLE

KIC

2. UNITED STATES - POLITICS FIS HI 21/00

AND GOVERNMENT Ard

i

B

**ISU GENDER DALAM POLITIK LUAR NEGERI
AMERIKA SERIKAT
MASA MADELEINE ALBRIGHT**

SKRIPSI



MILIK
PENGUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Oleh :

Herdiyanto Nova Ardono

NPM : 079213621

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
1998**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan
di depan komisi penguji pada tanggal 8 Januari 1998



Drs. Wahvudi Purnomo, M. Phil
NIP. 131801402

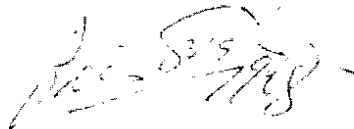
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Komisi Penguji

Pada tanggal 8 Januari 1998

Komisi Penguji terdiri dari:

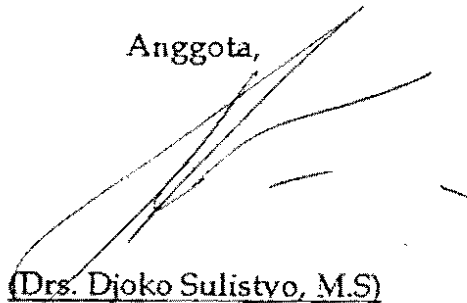
Ketua,



(Drs. Basis Susilo, M.A.)

NIP. 130937977

Anggota,



(Drs. Djoko Sulistyono, M.S.)

NIP. 1314153807

Anggota,



(Drs. Wahyudi Purnomo, M. Phil.)

NIP. 131801402

Abstraksi

Madeleine Albright adalah wanita pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Posisi ini menjadikannya sekaligus wanita dengan posisi tertinggi dalam pemerintahan Amerika Serikat sepanjang sejarah negara adidaya tersebut. Adakah yang membedakan perempuan dengan lelaki, hingga dibutuhkan waktu ratusan tahun untuk mengakui kehandalan dan kepiawaian seorang perempuan untuk menjabat jabatan yang amat penting dalam perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat tersebut ? Adakah yang membedakan Albright sebagai perempuan dalam merumuskan kebijakan luar negeri Amerika Serikat semasa jabatannya ? Apakah isu-isu gender menjadi lebih mengedepan dalam politik luar negeri Amerika Serikat ketika kini, seorang perempuan menjadi pimpinan Departemen Luar Negeri ?

Jawaban atas berbagai pertanyaan inilah yang dicoba diungkap dalam penelitian ini, menganalisis isu-isu gender dalam politik luar negeri Amerika Serikat masa Madeleine Albright menjadi Menteri Luar Negeri dalam kabinet pemerintahan Bill Clinton kedua (1997-2001).

Dalam penelitian ini, terungkap bahwa sebenarnya dalam masalah hubungan internasional dan politik luar negeri, apakah seseorang itu perempuan atau lelaki tidak banyak mempengaruhi rasionalitas yang bersangkutan terhadap isu-isu politik luar negeri. Minat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat terhadap isu-isu perempuan kini, lebih banyak ditimbulkan oleh kepentingan Clinton menyenangkan kelompok-kelompok wanita di dalam negeri daripada oleh didudukkannya seorang perempuan dalam ujung tombak politik luar negeri Amerika Serikat. Karena itu, isu-isu gender hanya menjadi semacam *footnote* dalam isu hak asasi manusia.

Kunci: gender, politik luar negeri, kepentingan nasional